



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dan adanya kebijakan nasional tentang efisiensi anggaran serta penyesuaian terhadap Visi Misi Walikota terpilih 2025-2030, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau subkegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.

7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan/atau subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

1. Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.
2. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.
3. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD.

Pasal 3

1. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan
BAB III : Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV : Penutup
2. Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2

Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
2. Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025.
3. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
4. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025.
5. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025.
9. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025.
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025.
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025.
15. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025.
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025.
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025.
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025.
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025.
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025.
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025.
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
24. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025.

26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025.
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
28. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025.
29. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025.
30. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Juli 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, yang dituangkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana dalam lampiran Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, bahwa seiring dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan saat ini, begitu pula berkenaan dengan Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2025. Selain itu Pemerintah Kota Blitar juga terus melanjutkan pembangunan diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang selaras dengan tema sebelumnya yaitu: “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”. Prioritas kebijakan selain terkait dengan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2025, juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2024 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2025 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3. Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025;
4. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2025.

2

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional. Dokumen ini juga menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.
2. Sekretariat, Kasi-kasi dan seluruh staf Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

5. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3460 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Mengakomodir kebijakan ASTACITA serta visi misi Walikota Blitar terpilih periode tahun 2025 - 2030

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan I (satu) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I (satu) tahun 2025, menunjukkan perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2025 juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan I (satu) tahun 2025 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2024 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2025 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian

target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2025. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2025. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65
 25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;
 26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2025 nomor 20);
 27. Surat Edaran Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah 2025 dengan mengacu pada perubahan RKPD tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan |
| BAB II | Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan, berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 |
| BAB III | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2025 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2025 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya |
| BAB IV | Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah |

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar triwulan I (satu) terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2025.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sampai dengan triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2025 yang melaksanakan 5 program dengan 15 kegiatan dan 40 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 14.084.546.521,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan I (satu) Tahun 2025 sebesar Rp. 1.477.015.544,- atau 10,49 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan I (satu) belum maksimal dikarenakan :

1. Kegiatan fisik konstruksi masih dalam proses pelaksanaan, yaitu pemeliharaan dan pembangunan jalan dan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan penyusunan data dan kajian – kajian dalam proses penyusunan laporan pendahuluan.
2. Penjadwalan agenda kegiatan dipengaruhi oleh mekanisme ketersediaan anggaran di tiap triwulan.
3. Jadwal bansos RTLH mundur dikarenakan Rekomendasi dari Bank penyalur baru terbit di triwulan II.
4. Perlu menyesuaikan jadwal dengan adanya efisiensi.

Tabel. 2.1.
TABEL EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	<u>Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)</u>		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		10 = 8		11 = 10/7 x100%		12 = 6 + 10		13 = 12/5 x 100 %		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			127.739.830.739		75.830.705.992,26		13.814.660.587		1.477.015.544		1.477.015.544,00		10,49		77.307.721.536,26		60,52	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP PD			A 86,73		A 86,73		A 86,73		A 86,73		100		A 86,73		102,55		
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP PD		A 86,73	A 86,73		A 86,73		A 86,73		A 86,73		100		A 86,73		102,55		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B 84,45 Indeks	21.172.133.420	92,42	13.324.382.322,90	90	5.496.419.775	89.10 Indeks	1.063.257.110	89.10 Indeks	1.063.257.110,00	99	19,34	89.10 Indeks	14.387.639.432,90	105,51	67,96	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	132.975.080	100 %	79.812.100	100 %	10.031.100	29.63	-	62,96	0	62,96	-	100%	0	100%	0,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	44.337.540	45	15.856.000	15 Doku men	6.611.000	4	-	4	0	26,67	-	49	15.856.000	81,67	35,76	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	88.637.540	36	27.166.200	12 Lapo ran	3.420.100	4	-	13	0	108,33	0,00	33,25	27.166.200	100	30,65	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	14.908.561.010	100 %	9.603.727.440	100 %	3.638.281.361	39,29	788.279.974	67.44	788.279.974,00	67,44	21,67	67.44	10.392.007.414	67.44	30,65	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	14.877.701.910	25 Orang /bula n	6.432.203.262	24 Orang /bula n	3.636.006.361	24	788.279.974	25	788.279.974,00	96,15	21,68	25	7.220.483.236	96,15	48,53	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	28 Laporan	30.859.100	21	9.850.000	7 Lapo ran	2.275.000	1	-	4	0	57,14	0,00	25	9.850.000	89,29	31,92	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	440.661.773	100 %	294.767.700	100 %	133.074.400	12,5	690.000	50	690.000,00	50	0,52	50	295.457.700	50	67,05	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	319.068.750	4	143.925.000	3 Paket	86.490.000	-	-	0	0	-	0,00	4	143.925.000	50	45,11	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	200 Orang	121.593.023	98	60.450.000	50 Orang	46.584.400	50	690.000	50	690.000,00	100	1,48	148	61.140.000	74	50,28	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	1.413.194.996	100 %	1.369.763.195,90	100 %	349.691.350	42,74	50.730.400	63,08	50.730.400,00	63,08	14,51	100	21.650.500,00	100	1,53	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.456.533	2	16.782.000	1 Paket	4.909.900	1	4.868.500	1	4.868.500,00	100	99,16	3	21.650.500	37,5	50,99	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	98.585.793	6	44.469.800	3 Paket	20.469.400	1.5	8.940.900	1.5	8.940.900,00	50	43,68	7,5	53.410.700	62,5	54,18	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	62.780.280	16	25.102.100	4 Paket	10.385.400	4	10.287.000	4	10.287.000,00	100	99,05	20	35.389.100	125	56,37	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	220.082.500	60	109.445.000	30 Paket	55.850.000	5	14.575.000	15	14.575.000,00	50	26,10	75	124.020.000	62,5	56,35	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	84.300.905	2	30.010.900	1 Paket	17.926.000	0.3	5.000.000	0,3	5.000.000,00	30	27,89	2,3	35.010.900	57,5	41,53	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	<u>Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)</u>		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	830.323.285	132	401.665.094	40 Laporan	220.407.000	1	7.059.000	7	7.059.000,00	17,5	3,20	139	408.724.094	86,88	49,22	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	66.625.700	5	26.950.000	5 Dokumen	19.743.650	1	-	2	0	40	0,00	7	26.950.000	35	40,45	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	89%	175.636.249	87	70.150.000	88%	114.416.300	87%	-	87%	0	98,86	0,00	87	70.150.000	97,75	39,94	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	0	0	1 Unit	11.571.800	-	-	0	0	0		0	0	0		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	155.636,249	5	70.150.000	8 Unit	102.844.500	-	-	0	0	0	0,00	5	70.150.000	45,45	45,07	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	3.132.571.905	100 %	1.476.381.063	100 %	884.395.800	28,6	190.930.892	51,2	190.930.892,00	51,2	21,59	51,2	1.667.311.955	51,2	53,23	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan	202.383.871	57	100.086.972	36 Laporan	76.488.000	9	15.667.317	18	15.667.317	50	20,48	75	115.754.289	56,82	57,20	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1105 Laporan	2.930.188.034	533	1.334.648.280	286 Lapo ran	807.907.800	85	175.263.575	150	175.263.575,00	52,4 5	21,69	683	1.509.911.855	61,81	51,53	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	968.532.407	100 %	429.780.824	100 %	366.529.464	6,29	32.625.844	31,29	32.625.844,00	31,2 9	8,90	31,29	462.406.668	31,29	47,74	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	<u>Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)</u>		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	551.833.673	10 Unit	220.223.618	11 Unit	138.510.000	10	32.625.844	10	32.625.844,00	90,91	23,55	10	252.849.462	100	45,82	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144 Unit	128.091.488	106	70.918.600	25 Unit	40.654.000	-	-	5		20	0,00	111	70918600	77,08	55,37	
		Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	177.171.000	-	-	1 unit	169.830.000	-	-	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
		Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit	81.436.246	1	9.960.000	1 unit	17.535.464	-	-	1		100	0,00	2	9960000	50	12,23	
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)												40	34						
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)												64,37	49						

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab				
	Predikat kinerja Kegiatan(%)																
				Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan													
				Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sumber Daya Manusia kurang, sehingga harus merangkap jabatan / melaksanakan tugas di luar tupoksi													
				Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Sumber Daya Manusia kurang, sehingga harus merangkap jabatan / melaksanakan tugas di luar tupoksi													
				Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pekerjaan dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada													
	Tujuan : Meningkatnya akses rumah layak huni		Rasio Rumah Layak huni	0,255 Rasio		0,26 6	0,25 1	0,251	0,251		0,251	98,43					
	Sasaran : Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar		Persentase rumah layak huni	98.79%		98,6 6	98,1 3	98,13	98,13		98,13	99,33					
2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100	10.735.531.200	100	4.720.023.324,25	100 %	1.638.232.980	100	151.247.982	100	9,23	100	4.871.271.306,25	100	45,38

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
			Persentase tingkat hunian Rusunawa	95		95		95%		95		95			95		100			
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloksi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	90	945.455.475	80	309.680.650	85%	627.983.500	80	1.050.000	82,35	1.050.000,00	96,88	0,17	82,35	310.730.650	91,5	32,87	
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus	4 Dokumen	426.281.650	-		2 Dokumen	535.500.000	0,05	-	0,15	0	7,5	0,00	0,15	0	0	0	
		Pendataan dan Verifikasi Calon	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah	2 Dokumen	255.317.500	3	135.011.250		2.530.000	0,3	1.050.000	0,5	1.050.000	50	41,50	3,5	136.011.250	1,75	53,30	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi					1 Doku men												
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terverifikasi	2 Dokumen	83.059,675	-		1 Doku men	89.953.500	0,07	-	0,37		37		0,37	0,00	18,5	0,00	
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kab/kota yang mendapatkan sosialisasi	100%	945.097.850	100 %	164.642.250	100 %	45.426.000	100%	-	100	0	100	0,00	100	164.642.250	100	17,42	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	400 Orang	323.352.959	300	71.327.900	60 Orang	29.913.000	-	-	0	0	0	0,00	300	71.327.900	75	22,06	
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada tim satgas, tim pendamping, dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	160 orang	192.428.700	-		40 Orang	15.513.000	-	-	0		0		0	0	0	0,00	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan jenis layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100%	1.798.732.294	100 %	50.840.915	100 %	118.916.900	100	-	100	0	0	0,00	100	516.048.05	100	2,83	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	<u>Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)</u>		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	40 Unit	752.677.419	2	42.939.415	6 Unit Ruma h	83.916.900	1	-	1	0	16,67	0,00	3	42.939.415	7,5	5,70	
		Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten/kota	6 Unit	201.513.700	-	-	1 Unit Ruma h	35.000.000	-	-	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	B 84,45 Indeks	6.461.245.581	92,42	4.194.859.509,25	86,26	845.906.580	89,1	150.197.982	89,1	150.197.982,00	103,29	17,76	89,1	4.345.057.491,25	105,51	67,25	
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi	8 Laporan	270.000,00	-	-	2 Laporan	79.996,00	0,5	7.641.500	0,5	7.641.500	25		0,5	7.641.500	6,25	2,83	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Pemilik/Penghuni Rumah Susun																	
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4 Dokumen	3.341.837,096	2	1.602.724,403	1 Doku men	765.910,580	0,25	178.430,623	0,5	178.430,623,00	50	23,30	2,5	1.781.155,026	62,5	53,30	
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)											50	57,09							
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)											74,17	18,16							
	Predikat kinerja Kegiatan(%)																			
			Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kegiatan sesuai agenda																	
			Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih terdapat masyarakat yang menempati rumah di kawasan rawan bencana dan belum memenuhi standart teknis RLH (Rumah Layak Huni)																	
			Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penguatan regulasi, penertiban dan penataan																	
			Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Dilaksanakan penyusunan regulasi daerah, sosialisasi, dan updating data secara periodic																	
3				82,73%	11.411.099	11.529,1		1.978,1	-	27.575,1	27.575,1	27.575,1	1,39	102,56	11.557,548	123,97	101,28			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	<u>Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)</u>		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh			84,56		20,11%				18,00%		89,51						
			Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	4,12		4,23		1,03%		-		0,50%				4,28	0	103,88		
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	100%	11.411.099.940	95	11.529.973.785	72,92%	1.978.162.000	72,92%	27.575.000	81,92	27.575.000	112,34	1,39	95	11.557.548.785	95	101,28	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	432 Unit	11.411.099.940	576	6.250.237.185	100 Unit Rumah	1.939.817.800	-	27.575.000	88	27.575.000,00	88	1,42	664	6.277.812.185	153,7	55,01	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
											I											
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	300 orang	198.603.189	200	63.729.000	100 Orang	38.344.200	-	-	10		10	0,00	210	63.729.000	70	32,09			
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)												137,96	135								
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																					
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)												51,17	135								
	Predikat kinerja Kegiatan(%)																					
			Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Database Rumah Tidak Layak Huni terhimpun dan terkelola dengan baik																			
			Faktor penghambat pencapaian kinerja : Data bersifat dinamis serta fluktuasi kondisi sosial ekonomi calon penerima bansos RTLH sangat mempengaruhi kemampuan swaday																			
			Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Dilakukan sosialisasi kepada calon penerima RTLH untuk dapat mewujudkan peningkatan RTLH																			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Sosialisasi kepada penerima dilakukan secara kontinyu; Optimalisasi Database											
	Tujuan : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana,sarana dan utilitas di kawasan permukiman		Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU Layak	85.64%	86,17	78,19	76,56	76,56	97,92	86,17	100,62		
4	Sasaran : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman		Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	89.89%	86,29	79.26	77,13	77,13	97,31	86,29	95,99		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	72%	52.973.338.799	85,1	3.731.235.366	85,1	99,86	85,1	118,19	30,25	
				75,66%			87,48	87,48		87,48	115,62		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman			87,48		88,12%												
			Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	52,23%		2,31		2,20%		-	-	2,2		100		4,4		8,42		
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	32%	1.833.971.089	9	766.518.965	2 doku men	164.973.200	0,1	2.880.600 ,	1,57	2.880.600,00	78,5	1,75	10,57	769.399.565	33,03	41,95	
		Penyusunan/Revie w/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalis asi	12 Dokumen	1.142.897.400	2	88.072.665	1 Doku men	149.768.600	0,1	-	1	0	100	0,00	3	88.072.665	25	7,71	
		Pembentukan/Pem binaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6 Kelompok Masyarakat	113.021.900	4	15.073.500	2 Kelo mpok Masy araka t	15.204.600	0,05	2.880.600 -	1	2.880.600	50	18,95	5	17.954.100	83,33	15,89	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	140.663 meter	51.140.367.710	200.499,85	15.064.895.810	200768,91m	3.566.262.166	200499,85	191.313.952	200499,85	191.313.952	99,86	5,36	200499,85	15.256.209.762	142,54	29,83	
			Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	85663 meter		119726,55		120597,31 meter		119726,55		119726,55		99,28		119726,55	0	139,76		
			Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	910		189		207 unit				189		20,77		378	0	41,54		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	770 unit	13.175.411.685	131	2.165.881.700	20 Unit Rumah	375.487.600	-	3.487.500	19	3.487.500,00	95	0,93	150	2.169.369.200	19,48	16,47	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab							
							I													
					Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan jadwal															
					Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses administrasi agak lambat															
					Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan penyerapan anggaran															
					Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Percepatan penyelesaian administrasi untuk proses penyerapan anggaran															
5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70%	8.015.095.963	92,5	5.846.411.555	97%	1.240.496.400	92	40.740.900	92,25	40.740.900,00	95,1	3,28	92,5	5.887.152.455	132,14	73,45	
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70		87		88%		87	,	87,2		99,09		88	0	125,71		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I										
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	24123 meter	8.015.095.963	30030,8	5.846.411.555	31476,33 m	1.240.496.400	30030,8	40.740.900	30030,8	40.740.900	95,4	3,28	30030,8	5.887.152.455	124,49	73,45	
			Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	21475 meter		16087,46		16273,21m		16087,46,	-	16087,46		98,86		16087,46	0	74,91		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16	7.538.680.100	14	3.782.385.569	3 Lokasi	1.230.799.799,93	0	38.105.900	0,82	38.105.900,00	27,33	3,10	14.82	3.820.491.469	92,63	50,68	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Laporan	476.415.863	16	143.915.400	4 Laporan	9.696.600	1	-2635000	2	2.635.000	50	27,17	18	146.550.400	112,5	31	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
							I								
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)								35,25	21					
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)														
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)								109,14	25,43					
	Predikat kinerja Kegiatan(%)														
			Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Penyerahan PSU Perumahan dari pengembang menjadi aset Pemerintah Kota Blitar; - Perencanaan peningkatan peningkatan PSU Perumahan telah dilakukan dengan baik; - Penyerahan aset PSU memiliki konsekuensi kewenangan pemeliharaan oleh Pemerintah Kota												
			Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Penyerahan aset PSU Perumahan pada sebagian perumahan belum terealisasi karena pengembang belum memproses penyerahan PSU sebagaimana ketentuan yang berlaku; - Beban PSU yang harus dipelihara / ditangani bertambah												
			Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan pengembang untuk segera melaksanakan mekanisme penyerahan PSU Perumahan; - Prioritasi penanganan PSU Perumahan												
			Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Koordinasi intensif dengan pengembang dimaksud untuk segera melaksanakan mekanisme penyerahan PSU Perumahan; - Penyusunan prioritas penanganan PSU Perumahan												
	Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)						95,89				29				

Realisasi anggaran kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sampai dengan triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2025 yang melaksanakan 5 program dengan 15 kegiatan dan 40 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 14.084.546.521,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan I (satu) Tahun 2025 sebesar Rp. 1.477.015.544,- atau 10,49 %.

Evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja program yang telah melampaui target tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah belum ada, dikarenakan triwulan I kegiatan belum berjalan optimal.
2. Realisasi kinerja program yang sesuai target tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah Program Pengembangan Perumahan.
3. Realisasi kinerja program yang di bawah target tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah Program Kawasan Permukiman dengan indicator a. Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh, b. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman, c. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan indicator a. Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh, b. Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Program Peningkatan PSU dengan indicator a. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan, b. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
4. Realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I masih di bawah target tahun 2025.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja antara lain :

1. Tidak semua perencanaan kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu, karena adanya refocusing;
2. Ketersediaan data maupun persyaratan teknis belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan data dalam setiap tahapan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana Permen PUPR 12 / 2023;
3. Data RTLH bersifat dinamis dan cenderung bertambah;
4. Kondisi sosial ekonomi calon penerima bansos RTLH sangat mempengaruhi kemampuan swadaya yang berpengaruh pada kemampuannya sebagai penerima program;
5. Masih ada pengembang yang belum melakukan penyerahan aset PSU Perumahan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mendorong pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi tetap dilaksanakan tiap bulan.
2. Mengidentifikasi data yang belum tersedia - Pemutakhiran data pelaksanaan SPM secara berkala - Koordinasi dengan BPBD dan OPD terkait.
3. Verifikasi data RTLH;
4. Sosialisasi kepada calon penerima RTLH tentang syarat dan mekanisme pelaksanaan bansos.
5. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengembang terkait penyerahan PSU Perumahan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Tahun 2025

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Perubahan Renja Tahun 2025 dapat disajikan pada table berikut ini :

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk	0,251	0,26
1.1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	97,61	98,66
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	78,19	87,76
2.1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	79,26	87,89
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	84.53	86.73
3.1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	84.53	86.73

Selain berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Dinas, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun 2024
Pada Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya akses rumah layak huni	- o Dilaksanakan sosialisasi standar teknis rumah layak huni - o Pendampingan dalam penerapan standar rumah layak huni pada program stimulan bansos.	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Rumah Layak Huni sesuai Standar	- o Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program - o Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	o Perlu adanya koordinasi antar OPD dalam merencanakan suatu kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	o Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	o Memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 15 kegiatan dan 40 sub kegiatan, terdapat 9 sub kegiatan (22,5%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 31 sub kegiatan (77,5%) mengalami perubahan (24 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 7 sub kegiatan mengalami penambahan) di Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja			
		Tetap	Berkurang	Bertambah	Jumlah
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	9	24	7	40

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran adalah kegiatan yang mengalami pengurangan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 24 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran sebanyak 7 sub kegiatan. Penambahan kegiatan tersebut dianggarkan untuk :

- 1. Sosialisasi Anti Korupsi
- 2. Pengadaan Personal Komputer
- 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor,
- 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
- 5. Penyambungan Jaringan Listrik di Rusunawa sebanyak 297 unit
- 6. Penambahan peningkatan RTLH
- 7. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengadaan PSU Perumahan

Adapun kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4. dibawah ini:

Tabel. 3.4. Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 yang mengalami perubahan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2025		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	0 4	0 1	2. 01	0 0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	6.611.000	611.000	Efisiensi
1	0 4	0 1	2. 01	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.420.100	170.100	Efisiensi
1	0 4	0 1	2. 02	0 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan	3.636.006.381	3.608.850.561	Insentif Pendapatan dihilangkan
1	0 4	0 1	2. 02	0 0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	7 Laporan	2.275.000	250.000	Efisiensi
1	0 4	0 1	2. 05	0 0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	86.490.000	17.740.000	Efisiensi

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2025		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	46.584.400	51.192.400	Sosialisasi Anti Korupsi
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	20.469.400	18.943.600	Efisiensi
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	55.850.000	49.250.000	Efisiensi
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.926.000	10.270.000	Efisiensi
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	20 Laporan	220.407.000	100.006.000	Efisiensi
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	102.844.500	125.050.300	Pengadaan Personal Komputer
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	286 Laporan	286 Laporan	807.907.800	799.857.800	Efisiensi

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2025		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	138.510.000	137.817.200	Efisiensi
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara / Direhabilitasi	1 unit	1 unit	169.830.000	209.238.406	Pemeliharaan gedung, pengecatan dinding dan plafon, papan nama
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	17.535.464	29.655.000	Bongkar dan Angkut Partisi dan BMD yang Masih Tersisa di Gedung Lama, Bongkar pasang AC, Perbaikan Instalasi listrik/ internet/ telepon
1	0	0	2.	0	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2 Dokumen	1 Dokumen	535.500.000	127.759.450	Efisiensi
1	0	0	2.	0	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	89.953.500	89.319.050	Efisiensi
1	0	0	2.	0	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	29.913.000	22.883.000	Efisiensi

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2025		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	04	02	2.02	004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	40 Orang	40 Orang	15.513.000	10.263.000	Efisiensi
1	04	02	2.05	001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	1 Laporan	79.996.000	26.548.800	Efisiensi
1	04	02	2.05	002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	765.910.580	1.446.626.115	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik, Penyambungan Daya Listrik 900 Va di Rusunawa sebanyak 297 unit
1	04	03	2.02	008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	149.768.600	148.508.800	Efisiensi
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	15.204.600	12.949.600	Efisiensi
1	04	03	2.03	002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	22 Unit Rumah	375.487.600	363.367.600	Efisiensi

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2025		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4 Laporan	4 Laporan	1.831.289.413,01	1.634.874.313,01	Efisiensi
1	4	3	03	0	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	19.432.500	14.072.000	Efisiensi
1	4	3	03	0	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	4,5 Ha	4,5 Ha	1.340.052.653,06	1.336.609.253,06	Efisiensi
1	4	4	2.	0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	118 Unit Rumah	1.939.817.800	1.967.527.800	Penambahan Peningkatan RTLH
1	4	4	2.	0	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	100 Orang	38.344.200	35.144.200	Efisiensi

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2025		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	3 Lokasi	1.230.799.799,93	1.219.988.988,93	Efisiensi
	4	5	01	0							
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	4 Laporan	9.696.600	11.071.600	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU
	4	5	01	0							
				3							

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2025

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2025;

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2025 terlihat dalam tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPRKP Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				12.882.973.855,00	14.084.546.521,00	13.916.565.587,00						17.162.914.181,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.882.973.855,00	14.084.546.521,00	13.916.565.587,00						17.162.914.181,00		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.882.973.855,00	14.084.546.521,00	13.916.565.587,00						17.162.914.181,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,73 indeks	90 indeks	5.504.519.775,00	5.496.419.775,00	5.327.605.117,00							5.473.040.009,00	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	10.031.100,00	10.031.100,00	781.100,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Kota Blitar		28.446.450,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	6.611.000,00	6.611.000,00	611.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			12.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.420.100,00	3.420.100,00	170.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			16.246.450,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	3.638.281.361,00	3.638.281.361,00	3.609.100.561,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Kota Blitar		3.596.669.534,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.636.006.361,00	3.636.006.361,00	3.608.850.561,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			3.593.314.534,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	7 Laporan	2.275.000,00	2.275.000,00	250.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup		3.355.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	133.074.400,00	133.074.400,00	68.932.400,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Kota Blitar	121.401.480,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	86.490.000,00	86.490.000,00	17.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup		76.730.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	46.584.400,00	46.584.400,00	51.192.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			44.670.980,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	349.691.350,00	349.691.350,00	218.458.550,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Kota Blitar		384.565.420,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.909.900,00	4.909.900,00	4.909.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			9.558.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.926.000,00	17.926.000,00	10.270.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			21.540.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	20 Laporan	220.407.000,00	220.407.000,00	100.006.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			230.915.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	19.743.650,00	19.743.650,00	19.743.650,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			30.125.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	88 %	88 %	114.416.300,00	114.416.300,00	136.622100,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Kota Blitar		88.491.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	11.571.800,00	11.571.800,00	11.571.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			17.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	102.844.500,00	102.844.500,00	125.050.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			70.991.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	884.395.800,00	884.395.800,00	876.345.800,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Kota Blitar		976.123.085,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	76.488.000,00	76.488.000,00	76.488.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			80.500.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	286 Laporan	286 Laporan	807.907.800,00	807.907.800,00	799.857.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			895.622.885,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	374.629.464,00	366.529.464,00	417.364.606,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Kota Blitar		277.342.340,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	146.610.000,00	138.510.000,00	137.817.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			148.862.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	40.654.000,00	40.654.000,00	40.654.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			42.686.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	85 %	85 %	630.458.500,00	627.983.500,00	219.608.500,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Masyarakat Kota Blitar		247.255.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
						Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2 Dokumen	1 Dokumen	535.500.000,00	535.500.000,00	127.759.450,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			141.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.005.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			5.505.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	89.953.500,00	89.953.500,00	89.319.050,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100 %	100 %	45.626.000,00	45.426.000,00	33.146.000,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Masyarakat Kota Blitar		47.907.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	30.113.000,00	29.913.000,00	22.883.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			31.618.650,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	40 Orang	40 Orang	15.513.000,00	15.513.000,00	10.263.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			16.288.650,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100 %	100 %	118.916.900,00	118.916.900,00	118.916.900,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Masyarakat Kota Blitar		158.634.735,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	83.916.900,00	83.916.900,00	83.916.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			108.634.735,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	B 86,26 indeks	90 indeks	745.906.580,00	845.906.580,00	1.473.174.915,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Masyarakat Kota Blitar		867.502.682,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	1 Laporan	79.996.000,00	79.996.000,00	26.548.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	665.910.580,00	765.910.580,00	1.446.626.115,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			787.502.682,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	76,17 78,09 2,2 % %	2,4 76,17 78,09 % %	3.062.237.600,00	3.731.235.366,07	3.510.381.566,07							5.427.817.275,00	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	174.818.700,00	164.973.200,00	161.458.400,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Masyarakat Kota Blitar		184.107.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	164.864.200,00	149.768.600,00	148.508.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			173.107.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
						Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	9.954.500,00	15.204.600,00	12.949.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	104245,4 m 183969,3 m 207 Unit	104245,4 m 183969,3 m 211 Unit	2.887.418.900,00	3.566.262.166,07	3.348.923.166,07			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Masyarakat Kota Blitar		5.243.709.775,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	22 Unit Rumah	375.487.600,00	375.487.600,00	363.367.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			3.538.687.635,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	1.871.961.300,00	1.831.289.413,01	1.634.874.313,01	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			464.023.450,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
						Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	32.445.000,00	19.432.500,00	14.072.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			34.067.250,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	4,5 Ha	4,5 Ha	607.525.000,00	1.340.052.653,06	1.336.609.253,06	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			1.206.931.440,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	1,03 20,11 % %	0,62 20,11 % %	1.888.262.100,00	1.978.162.000,00	2.002.672.000,00							3.400.289.180,00	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	72,92 %	95 %	1.888.262.100,00	1.978.162.000,00	2.002.672.000,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Masyarakat Kota Blitar		3.400.289.180,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	118 Unit Rumah	1.854.012.100,00	1.939.817.800,00	1.967.527.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			3.364.326.680,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	100 Orang	34.250.000,00	38.344.200,00	35.144.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			35.962.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	87 86 % %	88 95 % %	887.046.400,00	1.240.496.399,93	1.231.060.588,93							1.540.467.500,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	15922 m 28134 m	16273 m 31476,33 m	887.046.400,00	1.240.496.399,93	1.231.060.588,93			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Masyar akat Kota Blitar		1.540.467.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	4 Lokasi	879.824.800,00	1.230.799.799,93	1.219.988.988,93	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PBJT-Kons umsi Tenag a Listrik dari Sumb er Lain	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			1.529.467.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	4 Laporan	7.221.600,00	9.696.600,00	11.071.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dengan focus pada :

1. Perlu adanya upaya pengurangan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa perbaikan infratraktur permukiman terutama jalan dan drainase lingkungan serta kolaborasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, provinsi dan daerah serta swadaya masyarakat dan swasta
2. Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan fisik konstruksi di perumahan dan kawasan permukiman yang tertunda/terkena refocussing pada penganggaran tahun berikutnya
3. Adanya sosialisasi peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
4. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi MBR melalui pengajuan usulan pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN, usulan pembangunan Rusunawa dan mendukung partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - o melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - o menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.